

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. M Fatwa. 2005. *Pengadilan Hak Ad Hoc Tanjung Priok Pengungkapan Kebenaran Untuk Rekonsiliasi*. Dharma Pena Publishing. Jakarta.
- Al Araf (etal.). 2014. *Komnas HAM di Simpang Jalan*. IMPARSIAL. Jakarta Selatan.
- Amrah Muslimin. 1985. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Alumni. Bandung.
- Firmansyah Arifin (etal.). 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Krhn Bekerja Sama dengan Mkri Didukung oleh The Asia Foundation dan Usaid. Jakarta.
- Hans Kelsen. 1971. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. 2018. Nusa Media. Bandung.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. PT Alumni. Bandung
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Kunarto. 1997. *HAM dan Polri*. Cipta Manunggal. Jakarta.
- Lutfi J. Kurniawan (etal.). 2012. *Filosofi Pelayanan Publik*. Setara Press. Malang.
- Made Nurmawati (etal.). 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Fakultas Hukum Unud. Denpasar.
- Meity Taqdir Qodratillah (etal.). 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Mexasai Indra. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Miriam Budiardjo. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Muchamad Ali Syafa'at. *Tindak Pidana Teror: Belenggu Baru Bagi Kemerdekaan. dalam F.Budi Hadirman (etal.). 2003..Terorisme Definisi. Aksi dan Regulasi. Imprasial. Jakarta.*
- Muhammad Rakhmat. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara. LoGoZ Publishing. Bandung.*
- Paulus Efendi Lotulung. 1986. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.*
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.*
- Rhona K.M. Smith (etal.). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII. yogyakarta.*
- Roni Giandino. 2016. *Buku Pendampingan Untuk Guru dalam Pembelajaran Hak Asasi Manusia Tingkat SMA/SMK. Komnas HAM. Jakarta.*
- Satya Arinanto. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI. Jakarta.*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.*
- Supandi. 2011. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara). Pustaka Bangsa Press. Medan*
- Teuku Saiful Bahri Johan. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Deep Publish. Sleman.*
- Todung Mulya Lubis. 2005. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.*
- Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.*

JURNAL

- Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum. Universitas Gaja Mada Pres. 2018*
- Gunawan A.Tauda. "Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia". Jurnal Pranata Hukum. Fakultas Hukum UGM. Vol.6. Nomor 2 Juli 2011.
- Ifdal Kashim. 2002. Prinsip-prinsip Van Boven. *Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat. Elsam. Jakarta*

Ifdhal Kasim. "Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik: Sebuah Pengantar" dalam Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007. Jurnal Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2007.

Jootje Jafet Rares. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jurnal Vol.1/No.3/Juli-September /2013

Rommy Patra. Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 41 No 2 April 2012.

Sriyana. "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia". Jurnal Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta Selatan. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI tahun 2007.

SKRIPSI

Husendro. 2008. "*Pembuktian Pelanggaran Ham yang Berat Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham Pada Tingkat Penyelidikan (Studi Kasus: Peristiwa Alas Tlogo)*". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.

Made Jayantara. 2015. "*Kedudukan Hukum dan Fungsi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan oleh Pemerintah Daerah*". Tesis. Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

Raditya Gumelar Mahardika. 2012. "*Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organ) Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Diputus oleh Mahkamah Konstitusi*". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

BUKU TAHUNAN

Tim penulis Laptah 2019 Komnas HAM RI. 2019. *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia 2019*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta Pusat.

Biro Dukungan Penegakan HAM. 2018. *LKIP 2018*. Jakarta Pusat.

Biro Dukungan Penegakan HAM. 2016. *Laporan Kinerja (LKIP) 2016*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta Pusat.

Biro Dukungan Penegakan HAM. 2015. *Laporan Akuntabilitas Kinerja*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta Pusat.

BAHAN PUSTAKA TANPA PENULIS

Anonim. 2020. *Modul Kursus Online Hak Asasi Manusia Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya*. STHI Jentera. Jakarta

Anonim. 2020. *Modul Kursus Online Hak Asasi Manusia Hak Sipil dan Politik*. STHI Jentera. Jakarta.

Anonim. 2020. *Modul Kursus Online Hak Asasi Manusia Pengantar dan Sejarah HAM*. STHI Jentera. Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.